

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks masyarakat desa, pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk mendorong kesadaran kolektif warga akan pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan bukan hanya membekali individu dengan pengetahuan hak dan kewajiban, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika publik, dan semangat partisipatif.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Melalui proses ini, masyarakat didorong untuk mengenali potensi diri, menyadari peran sosialnya, dan mengambil bagian dalam kehidupan publik. Pendidikan kewarganegaraan yang dirancang berbasis komunitas menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mendorong transformasi sosial yang berakar dari bawah (Ramdani & Suryani, 2022).

Observasi awal yang dilakukan di Desa Holi, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi sosial dalam berbagai kegiatan masyarakat. Misalnya, dalam kegiatan musyawarah desa atau kerja bakti, kehadiran warga cenderung rendah dan didominasi oleh kelompok usia tertentu. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka tidak memahami fungsi forum desa, merasa tidak dilibatkan, atau merasa tidak memiliki kewenangan menyuarakan pendapat.

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi salah satu kendala utama dalam membangun partisipasi sosial. Banyak warga menganggap urusan pemerintahan adalah ranah perangkat desa semata, bukan menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan belum benar benar menyentuh lapisan masyarakat secara luas dan bermakna.

Dalam penelitian Rahayu dan Syamsudin (2021), disebutkan bahwa partisipasi sosial masyarakat desa meningkat secara signifikan ketika pendidikan kewarganegaraan diberikan dalam bentuk pelatihan yang kontekstual dan berbasis praktik. Kegiatan seperti diskusi warga, simulasi musyawarah, dan pelatihan kepemimpinan lokal terbukti efektif membangun kesadaran warga terhadap keterlibatan dalam kehidupan sosial.

Nilai-nilai pentingnya PKn seperti gotong royong, musyawarah, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial sejatinya telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Namun, nilai-nilai tersebut memerlukan penguatan secara sistematis agar tidak hanya menjadi simbolik, tetapi betul betul terinternalisasi dalam perilaku sosial warga. Pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai pengikat antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip kewargaan yang demokratis (Yuliana & Prasetyo, 2023).

Untuk mewujudkan partisipatif, diperlukan masyarakat yang pendekatan yang integratif antara pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjembatani kesenjangan informasi dan pemahaman warga, terutama di daerah pedesaan yang akses terhadap pendidikan masih terbatas. Pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat perlu bersinergi dalam menghadirkan pendidikan kewarganegaraan yang aplikatif dan menyentuh kebutuhan lokal.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan harus mempertimbangkan aspek budaya, kearifan lokal, dan konteks sosial masyarakat setempat. Ketika warga merasa pendekatan yang digunakan sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari, maka proses internalisasi nilai akan lebih efektif. Pelibatan tokoh adat dan agama dalam penyampaian nilai-nilai kewargaan dapat memperkuat daya terima masyarakat terhadap program tersebut.

Melalui pendekatan pendidikan yang tepat, warga dapat menjadi lebih kritis, peduli, dan aktif dalam kehidupan sosial. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk fisik seperti kerja bakti, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemecahan masalah bersama. Pendidikan kewarganegaraan

yang membumi dapat menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat yang berdaya, mandiri, dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi sosial di Desa Holi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan berbasis nilai-nilai kewargaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaiman peran pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan meningkatkan partisipasi sosial?

Apa kendala pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan meningkatkan partisipasi sosial?

Bagaimna upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan meningkatkan partisipasi sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan meningkatkan partisipasi sosial.

Untuk mengetahui kendala pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan meningkatkan partisipasi sosial.

Untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan meningkatkan partisipasi sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial masyarakat, terutama dalam konteks pedesaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan konsep dan model pemberdayaan berbasis nilai-nilai kewargaan yang kontekstual dan aplikatif sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, khususnya melalui pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat Desa Holi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi sosial serta mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan desa.
- c. Bagi lembaga pendidikan dan praktisi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis komunitas.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dalam mengkaji topik serupa serta membuka peluang untuk pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan, variabel, atau lokasi yang berbeda.